

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kompetensi**

###### **a) Pengertian Kompetensi**

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2013: 66). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengartikan kompetensi sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan Arifin (2011: 113), mendefinisikan kompetensi adalah jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola tindakan. Spencer & Spencer (1993: 9) menyebutkan:

*a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance on a job or situation.*

Karakter yang dimaksud adalah kepribadian (*personality*) dan kebiasaan (*behavior*) seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau sikap (*performance*) seseorang ketika menghadapi suatu situasi tertentu. Madar & Buntat (2011: 9) menyebutkan industri melihat keahlian teknis/*hard skills*, sekaligus keterampilan kerja/*soft skills* ketika mencari tenaga kerja. Selain itu industri lebih memilih tenaga kerja kompeten yang memiliki kemampuan dasar dalam bekerja sehingga tidak memerlukan

pelatihan dan pengenalan pekerjaan. Curtis&Mc.Kenzie (2002:51) mengelompokkan kompetensi menjadi 3 domain dan 3 kemampuan umum yaitu domain kemampuan utama berupa kemampuan dasar dan penggunaan teknologi informasi; domain kemampuan intelektual yaitu kemampuan berpikir, pemahaman kontekstual, dan kemampuan mengorganisir; dan yang terakhir adalah domain sifat pribadi yaitu kemampuan untuk terus belajar, sifat dan sikap kerja, dan kemampuan intrapersonal.

Pada Sekolah Menengah Kejuruan, kompetensi yang dipelajari sangat berhubungan erat dan seharusnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Karena bagaimanapun juga lulusan dari SMK nantinya diharapkan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Dengan demikian, kurikulum menuntut kerja sama yang baik antara pendidikan dan dunia usaha atau dunia industri, terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik di sekolah.

#### **b) Konsepsi Kompetensi**

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan kompleks yang dimiliki seseorang yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam pemikiran dan tindakan. Berdasarkan definisi dalam Permendikbud No.34 Tahun 2018

disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan SMK/MAK dirumuskan secara menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan gradasi kompetensi pada masing-masing program pendidikan 3 tahun dan 4 tahun sehingga dalam penelitian ini kompetensi personal, pengetahuan dasar, dan keterampilan kerja juga mengacu pada hal tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1) Kompetensi Personal**

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “Competence” yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memustuskan) sesuatu. Sedangkan pengertian personal atau personality atau kepribadian menurut Theodore M. Newcomb kepribadian ialah suatu kelompok sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. Hal ini berarti bahwa kepribadian itu bertujuan untuk menunjukkan kelompok dari tingkah-tingkah seorang individu untuk dapat berbuat, mengetahui, berfikir dan merasakan dengan secara khusus jika ia berhubungan dengan orang lain atau juga pada saat ia menghadapi suatu masalah/keadaan. Menurut Koentjaraningrat kepribadian ialah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi berlangsung selama manusia masih hidup didunia ini, kepribadian seseorang

individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. Dapat diambil kesimpulannya adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi seseorang yang dapat dibentuk dan menggambarkan latar belakang dan tingkah lakunya.

Kompetensi personal dalam penelitian ini digambarkan sebagai kompetensi perilaku pribadi seseorang dalam hal ini lulusan SMK dalam bekerja sebagai konsultan pengawas lapangan dan kompetensi personal ini mengacu pada dimensi kompetensi sikap pada standar kompetensi lulusan SMK menurut Permendikbud No.54 Tahun 2013.

## **2) Pengetahuan Dasar**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Selain itu Pudjawidjana mengartikan pengetahuan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat indranya untuk melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat berbentuk sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak.

Dalam penelitian ini pengetahuan dasar maksudnya adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu berbentuk sebuah informasi yang digunakan sebagai dasar untuk bekerja sebagai konsultan pengawas lapangan. Hal ini lebih dapat dijelaskan lagi didasarkan pada dimensi pengetahuan dalam Permendikbud No.54 Tahun 2013 sehingga kompetensi pengetahuan dasar lulusan SMK yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam bidang kerjanya yaitu sebagai konsultan pengawas lapangan.

### **3) Keterampilan Kerja**

Menurut Muzni Ramanto, Soemarjadi, Wikdati Zahri (1991:2) kata keterampilan identik dengan kata kecekatan. Orang yang dikatakan terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan benar. Akan tetapi, apabila orang tersebut mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat akan tetapi hasilnya tidak sesuai atau salah maka orang tersebut bukanlah orang yang disebut dengan terampil. Begitu pun sebaliknya, jika orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya dengan benar tetapi lambat dalam menyelesaikannya, maka orang tersebut juga tidak dapat dikatakan terampil. Sedangkan Gordon (1994) menjelaskan bahwa keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita ambil kesimpulan

bahwa keterampilan merupakan suatu bentuk kemampuan yang mempergunakan pikiran dan perbuatan dalam menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu dengan efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini kompetensi keterampilan kerja merupakan keterampilan-keterampilan yang digunakan dalam bekerja sebagai konsultan pengawas lapangan di Industri Jasa Kontruksi. *Australian Chamber of Commerce and Industry* (ACCI, 2002) dalam Pavlova (2009: 9) mendefinisikan delapan kompetensi kerja sebagai berikut :

- 1) Keterampilan berkomunikasi yang berperan dalam menumbuhkan produktifitas dan relasi yang harmonis antara tenaga kerja dan pelanggan;
- 2) Keterampilan bekerja dalam kelompok yang berperan meningkatkan relasi dan hasil kerja;
- 3) Keterampilan pemecahan masalah yang berperan meningkatkan hasil kerja;
- 4) Keterampilan inisiatif dan berusaha yang meningkatkan inovasi hasil kerja;
- 5) Keterampilan perencanaan dan organisasi yang berperan dalam perencanaan stategis jangka panjang maupun jangka pendek;
- 6) Keterampilan manajemen diri yang berperan meningkatkan kepuasan dan peningkatan pribadi tenaga kerja;
- 7) Keterampilan belajar yang berperan dalam proses peningkatan dan pe-ngembangan diri tenaga kerja maupun perusahaan ke

depan; dan

- 8) Keterampilan teknologi yang berperan dalam efektifitas pelaksanaan kerja.

## **2. SMK Teknologi Kontruksi dan Properti**

### **a. Pengertian SMK**

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 telah mengatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU RI No 20/ 2003).

Menurut Sudira (2009) pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaanpekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha/industri, diawasi oleh masyarakat dan pemerintah atau dalam kontrak dengan lembaga serta berbasis produktif. Senada dengan definisi tersebut Finch dan Crunkilton yang dikutip Slamet (2008) bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat bekerja guna menopang kehidupannya. Menurut Djojonegoro (1998) pendidikan kejuruan

adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Orientasi semacam ini membawa konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu benang merahnya. Menurut Evans dalam Djojonegoro (1999) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menurut Sanjaya (2008: 159), pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Sedangkan pendapat Murniati (2009: 1), pendidikan kejuruan adalah Vocational Education yang merupakan pendidikan khusus untuk menyiapkan peserta didiknya memasuki dunia kerja tertentu, jabatan karir tertentu.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari



SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003).

Mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan keJuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu (Depdikbud, 1995). Berdasarkan definisi di atas, maka sekolah menengah kejuruan sebagai sub sistim pendidikan nasional seyogyanya mengutamakan mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu memilih karir, memasuki lapangan kerja, berkompetisi, dan mengembangkan dirinya dengan sukses di lapangan kerja yang cepat berubah dan berkembang.

Tercapai tidaknya tujuan di atas sangat tergantung pada masukan dan sejumlah variabel dalam proses pendidikan. Salah satu variabel dalam proses pendidikan yang menentukan ketercapaian tujuan SMK

adalah kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia pendidikan tinggi (Depdikbud, 1995). Semakin erat hubungan antara SMK dengan dunia pendidikan tinggi, logikanya semakin baik kualitas tamatannya, yang berarti kualitas tamatan dapat ditingkatkan karena di dunia pendidikan tinggi, ilmu dan teknologi akan berkembang.

Dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditentukan kompetensi di setiap jurusan masing-masing yaitu :

### **1. Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standard kompetensi lulusan (SKL), standard isi (SI), standard proses, dan standard penilaian. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang standard kompetensi lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adapun pengertian Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi

penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

**Tabel 1.** Standar Kompetensi Kelulusan SMK

Dimensi	SMA/SMK/MA/MAK
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Ketrampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri

(Sumber : Permendikbud No. 54 tahun 2013)

Standar kompetensi (SK) merupakan alat untuk memantau perkembangan mutu pendidikan diperlukan SK. SK dapat didefinisikan sebagai “pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran” (Center for Civics Education, 1997:2). Menurut definisi tersebut, SK mencakup dua hal, yaitu standar isi (content standards), dan standar penampilan (performance standards). SK yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai peserta

didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu seperti Kewarganegaraan, Matematika, Fisika, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. SK yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap SI.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa SK memiliki dua penafsiran, yaitu:

1. Pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui peserta didik dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu mata pelajaran.
2. Spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian. SK merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. SK juga merupakan fokus dari penilaian, sehingga proses pengembangan kurikulum adalah fokus dari penilaian, meskipun kurikulum lebih banyak berisi tentang dokumen pengetahuan, keterampilan dan sikap dari pada bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa peserta didik yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Dengan demikian SK diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, melakukan respon dan

reaksi yang tepat bila ada penyimpangan dari rancangan semula, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Penyusunan SK suatu jenjang atau tingkat pendidikan merupakan usaha untuk membuat suatu sistem sekolah menjadi otonom, mandiri, dan responsif terhadap keputusan kebijakan daerah dan nasional. Kegiatan ini diharapkan mendorong munculnya standar pada tingkat lokal dan nasional. Penentuan standar hendaknya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Sebab, jika setiap sekolah atau setiap kelompok sekolah mengembangkan standar sendiri tanpa memperhatikan standar nasional maka pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu sekolah. Akibatnya kualitas sekolah akan bervariasi, dan tidak dapat dibandingkan kualitas antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Lebih jauh lagi kualitas sekolah antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain tidak dapat dibandingkan. Pada gilirannya, kualitas sekolah secara nasional tidak dapat dibandingkan dengan kualitas sekolah dari negara lain.

Pengembangan SK perlu dilakukan secara terbuka, seimbang, dan melibatkan semua kelompok yang akan dikenai standar tersebut. Melibatkan semua kelompok sangatlah penting agar kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh pihak sekolah masing-masing. Di samping

itu, kajian SK di negaranegara lain perlu juga dilakukan sebagai bahan rujukan agar lulusan kita tidak jauh ketinggalan dengan lulusan negara lain. SK yang telah ditetapkan berlaku secara nasional, namun cara mencapai standar tersebut diserahkan pada kreasi masing-masing wilayah.

**b. Kerangka Kualifikasi Kompetensi SMK**

Kerangka kualifikasi merupakan instrumen untuk mengklasifikasikan kualifikasi seseorang berdasarkan seperangkat kriteria yang dikaitkan dengan jenjang capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh. Kerangka kualifikasi yang berlaku di Indonesia adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam hal ini, KKNI dan SKL jenis dan jenjang pendidikan tertentu dibuat berdasarkan KKNI, sedangkan KKNI dibuat dengan mengacu pada *ASEAN Qualifications Reference Framework* (AQRF), sesuai dengan perjanjian pelaksanaan *ASEAN Economic Community* (AEC). Pelevelan dalam AQRF didasarkan pada jangkauan wawasan pengetahuan dan kemampuan berikut: kompetensi kognitif dengan penggunaan teori dan konsep, kompetensi fungsional (*know-how*), kompetensi personal, dan kompetensi etika kerja. Domain dari AQRF adalah pengetahuan (*knowledge and skills*) dan aplikasi dan tanggung jawab (*application and responsibility*) yang terbagi menjadi 8 level kualifikasi. Dalam daftar referensi kerangka kerja ASEAN memuat

level pekerjaan, kompetensi pengetahuan dan kemampuan beserta aplikasi yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja di level tersebut.

Tenaga kerja lulusan SMK program 3 tahun menempati level 2 KKNI, dengan kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan umum dan faktual, termasuk kemampuan dalam melaksanakan tindakan dasar dan mampu mengaplikasikan proses pekerjaan terstruktur serta dapat bertanggung jawab mengawasi dan memberikan pendapat secara bijak untuk menyelesaikan isu-isu terkait (Sekretariat ASEAN, 2015: 4 - 6).

KKNI menggunakan konsep yang sama dengan ARQF, namun terdapat 9 level kualifikasi kompetensi yang terbagi ke dalam 3 kelompok jabatan: Level 1 - 3 dalam jabatan operator, Level 4 - 6 dalam jabatan teknisi atau analisis, dan Level 7 - 9 dalam jabatan ahli (Peraturan Presiden Nomor 8, 2012: 3).

KKNI tidak menggunakan istilah domain, yang digunakan adalah parameter atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja sesuai level pendidikan yang dimiliki, yaitu: (1) ilmu pengetahuan (*science*), (2) pengetahuan (*knowledge*), (3) pengetahuan praktis (*know-how*), (4) keterampilan (*skill*), (5) afeksi (*affection*), dan (6) kompetensi (*competency*). Keenam parameter pada masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi yang memuat kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai, dan kemampuan manajerial (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2015: 8). Selain



deskripsi umum, kualifikasi level 1 dan 2 memiliki tiga parameter yaitu kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab; kualifikasi level 3 hingga level 6 memiliki empat parameter dimana ketiga parameter berupa pengetahuan, kemampuan, dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sedangkan satu parameter mengenai Kualifikasi level 7 hingga level 9 memiliki tiga parameter dimana parameter pengetahuan dan tanggung jawab menyatu dengan aplikasi. Lulusan SMK program 3 tahun dituntut memiliki kualifikasi level 2 (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8, 2012: 7) dengan parameter kompetensi berikut:

1. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
3. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Jenis pekerjaan sesuai jenjang KKNi level 2 bekerja sebagai asisten di industri konstruksi. Terdapat tiga kompetensi untuk level tersebut yaitu Kompetensi Inti (Fungsional), Khusus (Spesifik), dan Pilihan (Optional). Kompetensi Inti adalah kompetensi yang sesuai kebutuhan industri sesuai peraturan pengemasan kualifikasi yang harus

dimiliki tenaga kerja. Kompetensi Spesialisasi (aliran) adalah kompetensi yang khusus untuk sub sektor tertentu dari industri atau pekerjaan. Kompetensi pilihan adalah kompetensi yang ditentukan oleh industri dan dapat dipilih oleh para individu untuk memenuhi prasyarat kualifikasi (Powell et al., 2015: 40 - 41).

### **c. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan**

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk dari pendidikan kejuruan. Sekolah menengah kejuruan bertujuan menyiapkan lulusan untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah, disamping untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan selain memenuhi ketentuan persyaratan penyelenggaraan, jumlah dan tingkat pendidikan guru, kurikulum, fasilitas dan pembiayaan, sekolah kejuruan harus memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja, termasuk dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).

Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.
2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Membekali peserta didik dengan kompetensi kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

#### **d. Kebijakan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan**

Arah pengembangan SMK di Indonesia ke depan didasarkan pada kebijakan revitalisasi SMK, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. Revitalisasi pendidikan di SMK merupakan gambaran visi (kondisi ideal) mengenai proses penyelenggaraan pendidikan di SMK, yang harus dijadikan acuan semua pihak dan arah pengembangan SMK ke depan (Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016). Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven*. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan juga diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Demikian pula, disain kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pengujiannya juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Secara operasional, implementasi dari filosofi *demand-driven* tersebut di atas, adalah dengan meningkatkan kerjasama antara SMK dengan DU/DI pasangan sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan kejuruan yang baik adalah pendidikan kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, proses pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan DU/DI. Oleh karena itu, kehadiran DU/DI

bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik untuk melakukan praktik magang, namun pelibatan DU/DI harus merefleksikan implementasi dari keahlian ganda DU/DI dengan sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Proses pelibatan DU/DI ini terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kejuruan, yang meliputi: (1) pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) memanfaatkan DU/DI untuk memberikan pelatihan bagi guru, sehingga guru dapat terus memutakhirkan pengetahuannya dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan program kejuruannya; (3) meminta DU/DI untuk mengirimkan tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor bagi peserta didik; dan (4) melibatkan DU/DI dalam pembiayaan pendidikan, termasuk dilibatkan dalam pembangunan laboratorium, tempat praktik atau pemberian bantuan peralatan praktik kepada sekolah.

Idealnya, pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan: (1) permintaan pasar (*demand driven*); (2) kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan; dan (3) kecocokan (*match*) antara kompetensi calon tenaga kerja (*employee*) yang diluluskan oleh SMK dengan kebutuhan pengusaha (*employer*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus dilihat dari

tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipelajari di SMK.

Kerjasama lembaga pendidikan kejuruan dengan DU/DI, dapat diwujudkan tidak sekedar sebagai tempat praktik, dan sebagai tempat magang untuk menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya, tetapi juga dapat difungsikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK dalam hal berikut :

#### **1) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik**

Banyak satuan pendidikan kejuruan yang tidak memiliki peralatan dan fasilitas praktik yang memadai untuk melaksanakan praktik keahlian, agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan. Akibatnya, industri harus mengadakan pelatihan tambahan untuk menyiapkan tenaga kerjanya, pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi.

Disparitas yang terjadi antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan kejuruan merupakan permasalahan yang tak pernah selesai. Sebenarnya, pihak sekolah maupun pihak industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas pelaksanaan praktik,

sedangkan pihak DU/DI memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan industri sebagai tempat praktik peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas yang terjadi sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif dan sesuai dengan dunia kerja.

Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja.

## **2) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja**

Sistem magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan kejuruan. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal di sekolah.

Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di industri memberikan pengalaman langsung bagi para peserta didik mengenai kegiatan bekerja

langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

Industri sebagai tempat magang kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta didik, tetapi industri juga merasakan kontribusi para peserta didik selama pelaksanaan magang serta industri bisa membentuk para peserta didik untuk menjadi seorang tenaga terampil yang siap bekerja. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi industri untuk memperoleh tenaga kerja yang sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi mengadakan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mereka butuhkan.

### **3) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen Dunia Kerja**

Selain sebagai tempat magang untuk memahami proses dan budaya kerja, industri juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Dalam hal ini, peserta didik di SMK tidak hanya melakukan pengamatan mengenai cara pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan, akan tetapi secara tidak langsung juga belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu, peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha sehingga mereka memiliki



wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini peserta didik juga bisa menambah kapabilitas pada dunia wirausaha. Pengalaman yang diperoleh peserta didik dari DU/DI tersebut diharapkan akan bisa mengembangkan bakat dan potensinya setelah lulus nanti, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan usaha baru sebagai wirausaha mandiri.

#### **4) Peran DU/Di dalam Penyelarasan Kurikulum**

Penyelarasan kurikulum SMK perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu.

Salah satu strategi untuk memastikan agar kurikulum SMK dapat selaras dan memenuhi kebutuhan DU/DI adalah model *dual system*. *Dual system* pada pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Bila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak dan lebih

bertumpu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program *dual system* pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah dan institusi pasangannya. Secara operasional, fungsi tersebut dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan pihak DU/DI terkait.

Tujuan utama *dual system* adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan DU/DI. Secara umum, struktur *dual system* meliputi: (1) kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam pembelajaran mengacu pada fase pembelajaran di sekolah dan praktik/pelatihan di DU/DI; dan (2) kegiatan praktik kerja, dilaksanakan menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tahapan pekerjaan di DU/DI.

### **3. Industri Jasa Kontruksi**

#### **a. Pengertian Industri Jasa Kontruksi**

Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri (Hillebrandt,1985). Jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik. Jasa tersebut meliputi

kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharannya. Prasarana dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam pembangunan nasional, termasuk di sektor pertambangan, serta jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional (Suraji, 2003). Sebelum terjadi krisis moneter, sektor jasa konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup fantastik sehingga merupakan salah satu motor penggerak sektor perekonomian yang utama.

#### **b. Kualifikasi Jasa Kontruksi**

Adapun kualifikasi Badan Usaha Jasa Golongan Besar menurut Peraturan Lembaga LPJK No.11a Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

##### **a) Golongan Besar I :**

1. Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar
2. Pengalaman :
  - a. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2) dan wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah
  - b. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2)

dan untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).

3. PJT : 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya
4. PJBU : Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK
5. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan : 0 sampai dengan Rp 250 Milyar
6. Batasan Nilai Satu Pekerjaan : Maksimum Rp 250 Milyar
7. Jumlah Paket : 6 atau  $1.2 \times N$
8. Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi : Maksimum 14
9. Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.

**b) Golongan Besar II :**

1. Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas
2. Pengalaman :
  - a. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); dan wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah
  - b. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1) dan Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).

3. PJT : 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya
4. PJBU : Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK
5. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan : 0 sampai dengan tak terbatas
6. Batasan Nilai Satu Pekerjaan : Tak Terbatas
7. Jumlah Paket : 6 atau  $1.2 \times N$
8. Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi : Tak Terbatas

Jenis usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi disebut konsultan, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi bidang : Perencanaan arsitektur, Perencanaan rekayasa (*engineering*), Perencanaan Penataan Ruang, Pengawasan Arsitektur, Pengawasan Rekayasa (*engineering*), Pengawasan Penataan Ruang, Konsultasi Spesialis, dan Jasa Konsultasi lainnya Perusahaan konsultan bisa berbentuk CV, Koperasi, Firma, PT, PT PMA, dan BUJKA. Untuk kualifikasi jasa perencana dan pengawas konstruksi terdapat pada Peraturan LPJK No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Regulasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Kontruksi yang dapat diringkas sebagai berikut :

**Tabel 2.** Kualifikasi Jasa Perencana dan Pengawas Kontruksi

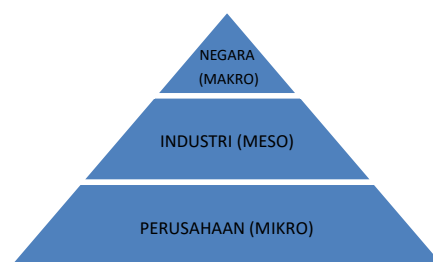
Kualifikasi	Modal Disetor Perusahaan	Pengalaman Kerja	Tenaga Ahli
Kecil 1 (K1)	>Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	1 orang SKA Ahli Muda PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU
Kecil 2 (K2)	>Rp 100 Juta	Melaksanakan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif > Rp 500	1 orang SKA Ahli Muda PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU

Kualifikasi	Modal Disetor Perusahaan	Pengalaman Kerja	Tenaga Ahli
		Juta selama kurun waktu 4 tahun	
Menengah 1 (M1)	>Rp 150 Juta	Melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif > Rp 750 juta selama kurun waktu 10 tahun, bagi perusahaan yang baru berdiri, pengalaman pekerjaan dilihat dari PJT atau PJK	1 orang SKA Madya untuk maksimal 2 subklasifikasi bidang usaha, 1 orang PJT minimal SKA Madya, 1 orang PJK minimal SKA Madya, 1 orang PJBU diman PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU
Menengah 2 (M2)	>Rp 300 Juta	Melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif > Rp 1,5 milyar selama kurun waktu 10 tahun	1 orang SKA Madya untuk maksimal 2 subklasifikasi bidang usaha, 1 orang PJT SKA Madya, 1 orang PJK SKA Madya, 1 orang PJBU dimana PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU
Besar (Termasuk PT PMA)	>Rp 500 Juta	Melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan totoal nilai kumulatif > Rp 2,5 milyar selama kurun waktu 10 tahun	1 orang SKA Madya untuk maksimal 2 subuklasifikasi bidang usaha, 1 orang PJT minimal SKA Madya, 1 orang PJK minimal SKA Madya, 1 orang PJBU dimana PJT tidak boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU

**c. Daya Saing (*Competitiveness*)**

Istilah daya saing berasal dari kata daya yang bermakna kekuatan, dan kata saing yang berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu

yang dilakukan oleh kelompok atau institusi tertentu. Konsep daya saing mengacu pada kemampuan untuk mencapai dominasi dan kemantapan dalam kompetisi antara perusahaan individual dan pesaing ditingkat mikro (perusahaan) dan antara ekonomi pada tingkat ekonomi makro (Markus,2008). Daya saing (*competitiveness*) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat hirarki yaitu negara (makro), sektor industri (meso) dan perusahaan (mikro) (Momaya dan Selbi, 1998). Daya saing negara didefinisikan sebagai suatu lingkungan nasional yang dapat membangun bisnis. Daya saing sektor didefinisikan sebagai sektor bisnis yang menawarkan potensi untuk tumbuh dan ROI (*return on investment*) yang menarik. Konsep ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan kolektif perusahaan untuk bersaing secara internasional. Daya saing perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk yang lebih superior dibanding pesaingnya, dengan mempertimbangkan harga dan kualitas.



**Gambar 1.** Hirarki Daya Saing  
( Sumber : Momaya & Selbi, 1998)

Menurut Kadin (2002), kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai industri jasa konstruksi yang kuat dan tangguh yaitu :

1. Tersedianya tenaga manajemen maupun tenaga ahli yang profesional dalam jumlah yang cukup.
2. Bahan baku/material yang distandardisasi secara nasional dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan.
3. Peralatan konstruksi harus diperoleh dengan mudah dan kompetitif.
4. Sistem informasi industri jasa konstruksi yang tepat dan terbuka mulai dari konsepsi proyek sampai saat-saat pelelangan.
5. Pengenalan terhadap metode-metode konstruksi yang mutakhir dan efisien sehingga dapat unggul dalam pelelangan internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami beberapa permasalahan yang sering terjadi pada industri jasa konstruksi yang mengakibatkan rendahnya daya saing, yaitu :

1. Buruknya sikap mental dan perilaku oknum. Menurut Pranoto (2005), yang menjadi penyebab berbagai permasalahan di sektor konstruksi dan investasi di Indonesia adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang merupakan akibat dari bobroknnya moral dan sikap mental (*attitude*) dan buruknya perilaku oknum.
2. Kurangnya daya saing dengan kontraktor asing akibat keterbatasan dana dan teknologi. Menurut penjelasan Sutjipto (1991), fasilitas jaminan bank kontraktor Indonesia masih sering ditolak oleh pemilik proyek di luar negeri yang menyebabkan kontraktor nasional masih sangat kesulitan untuk bersaing dengan kontraktor asing yang



mampu memperoleh finansial dengan bunga rendah di negaranya. Selain itu, akibat keterbatasan kemampuan pemerintah maupun swasta untuk membiayai pembangunan proyek-proyeknya dengan anggaran dalam negeri, maka menyebabkan hampir semua proyek-proyek besar milik pemerintah maupun swasta dibiayai oleh dana pinjaman luar negeri. Dengan menggunakan alasan bahwa kontraktor nasional belum berpengalaman dan berkemampuan dalam teknologinya, investor asing cenderung membawa kontraktor dari negaranya. Akibatnya, secara otomatis kontraktor-kontraktor asing masuk bersama dengan datangnya pinjaman luar negeri tersebut.

3. Kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya peran jasa konstruksi bagi kepentingannya masih perlu ditumbuh kembangkan (Trisnowardono,2002).

#### **d. Indikator Yang Mengungguli Daya Saing Perusahaan Jasa**

##### **Konstruksi**

Berdasarkan penelitian Langford dan Male (2001), dijelaskan beberapa indicator kunci daya saing perusahaan jasa konstruksi sebagai berikut :

##### **1. Corporate Image**

- a. Organization's credibility
- b. Qualification of the company
- c. Project performance record

**2. Technology and innovation**

- a. Technology know-how
- b. Technology advancement
- c. Investment on R&D
- d. Conversant with local practice

**3. Marketing capability**

- a. Market coverage
- b. Procurement ability
- c. Ability to forecast market changes
- d. Relationship with clients and consultants

**4. Financial capability**

- a. Financial status
- b. Credibility grade
- c. Payment to subcontractors or suppliers
- d. Loan repayment

**5. Project management skill**

- a. Site progress management
- b. Quality control
- c. Coordination with subcontractors
- d. Contract and risk management
- e. Environmental and safety management
- f. Knowledge about local construction law

## **6. Organization & Human resource**

- a. Organizational structure & culture
- b. Quality of personnel
- c. Effectiveness of training program
- d. Effectiveness of internal cooperation

## **4. Konsultan Pengawas**

Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan (*consultancy service*) dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, dan lain-lain. Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan pegawai perusahaan sang pengguna layanan (*client*), melainkan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, serta berurusan dengan berbagai pengguna layanan dalam satu waktu.

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (*owner*) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli dibidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrik, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien.

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.

- 2) Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
- 3) Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- 4) Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- 6) Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
- 2) Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
- 3) Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.
- 4) Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shop drawing pelaksana proyek.
- 5) Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (*site Instruction*)

- 6) Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Konsultan pengawas biasa diadakan pada proyek bangunan dengan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi, bagian ini bisa merangkap dalam hal management konstruksi didahului dengan kalimat yang disingkat MK namun perbedaannya adalah MK mengelola jalanya proyek dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai berakhirnya proyek sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalanya pelaksanaan proyek saja. dalam kondisi nyata dilapangan diperlukan kerjasama yang baik antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan misalnya kontraktor dibatasi oleh waktu dalam melaksanakan pekerjaan jadi akan sangat terpengaruh dari proses *aproval material* atau *shop drawing* dari konsultan pengawas.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Hasil penelitian Safitri dkk. (2012) mengenai Relevansi Kompetensi Program Studi Keahlian Teknik Bangunan dengan Pekerjaan Lulusan di Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan bahwa semua kompetensi lulusan untuk paket keahlian teknik konstruksi baja dalam kategori tidak relevan; semua kompetensi keahlian teknik konstruksi kayu dalam kategori tidak relevan; semua kompetensi keahlian teknik konstruksi batu dan beton dalam kategori relevan; dan semua kompetensi keahlian teknik gambar bangunan dalam kategori relevan. Hasil penelitian menunjukkan dua dari empat

kompetensi keahlian, yaitu keahlian teknik konstruksi baja dan keahlian teknik konstruksi kayu masuk dalam kategori tidak relevan dilihat dari bidang pekerjaan, keterampilan, dan pengetahuan.

Penelitian Suwarsono & Sutarto (2013) mengenai relevansi Kurikulum TGB SMKN 3 Yogyakarta dengan kebutuhan dunia Industri, yang dilakukan pada 35 industri jasa konstruksi dan 9 guru, menunjukkan bahwa: (1) tingkat relevansi Kurikulum TGB SMKN 3 Yogyakarta dengan kebutuhan dunia Industri dalam kategori yang sangat relevan (83,95%), (2) keterlaksanaan kurikulum TGB SMKN 3 Yogyakarta yang didasarkan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses dalam kategori sangat baik (81,50%), (3) kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan dengan memasukkan kemampuan penggunaan komputer dan penambahan jam pelajaran desain, (4) tingkat keterlaksanaan kurikulum yang perlu diperbaiki dan dikembangkan adalah penyempurnaan silabus dan RPP serta melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif.

Shyamalee et al. (2013: 58-59) dalam penelitiannya yang berjudul *“Employability Skills Expected from Fresh Civil Engineering Graduates”* bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok atribut yang penting dalam menjelaskan *employability skills* berdasarkan harapan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang paling dibutuhkan oleh industri adalah sikap personal, sikap kerja, pengetahuan keteknikan, kemampuan teknik dan administrasi, kemampuan manajemen, pengetahuan desain teknik dan standar konstruksi. Hasil temuan konsisten untuk seluruh

bidang pekerjaan konstruksi (sub-bidang jalan, bangunan, jembatan, dan bangunan pabrik/ bengkel/ kebun). Perusahaan terutama menginginkan pekerja dengan sikap personal dan sikap kerja yang baik.

Yusof et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Improving Graduates’ Employability Skills through Industrial Training: Suggestions from Employers*” bertujuan untuk memperoleh informasi dari pengguna tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga mereka dapat siap kerja ketika lulus. Penelitian ini dilakukan terhadap 179 perusahaan tempat pelaksanaan PRAKERIN mahasiswa dari suatu universitas di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna tenaga kerja puas dengan hasil kerja mahasiswa selama PRAKERIN, terutama mengenai kompetensi personal dan kemampuan dasar, juga menyatakan kemampuan proses yang dimiliki mahasiswa sudah sangat baik. Banyak perusahaan berniat melakukan rekrutmen dini. Meski demikian, industri menyarankan peningkatan sikap kerja, kemampuan teknis, kemampuan komputerisasi, dan durasi pelatihan. Hasil ini menunjukkan kolaborasi universitas dan perusahaan industri memberikan dampak positif dalam kompetensi lulusan ketika mendapatkan pekerjaan.

Selanjutnya, penelitian Wagiran (2008) yang berjudul “*The Importance Of Developing Soft Skills in Preparing Vocational High School Graduates*” bertujuan untuk mencari kesesuaian antara kompetensi yang dibekalkan pendidikan menengah kejuruan dengan yang dibutuhkan ketika bekerja dan mengetahui solusi industri dalam menyikapi kekurangan dan keterbatasan lulusan sebagai tenaga kerja baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih

terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan industri, terutama industri besar. Lulusan memiliki dasar kompetensi kerja namun masih perlu pelatihan kembali terutama karena keterbatasan media serta kompleksitas pekerjaan di industri. Beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan adalah perencanaan kerja, kemampuan K3, pemahaman kualitas dan instruksi kerja. Kekurangan terbesar dari lulusan SMK ketika bekerja dan perlu diperbaiki adalah kemampuan *soft skills* yang rendah terutama etika kerja, disiplin, *team work*, kompetisi kerja, dan mental kerja.

### C. Kerangka Pikir

Sekolah Menengah Kejuruan dengan merujuk pada berbagai bidang keahlian yang dimiliki, mengajarkan pengetahuan umum dan kejuruan serta melatih berbagai keterampilan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sesuai tingkat dan bidang pekerjaan. Lulusan SMK merupakan calon tenaga kerja yang telah dididik untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki sehingga lulusannya seharusnya sudah siap untuk bekerja di industri yang relevan. Kompetensi lulusan SMK dirumuskan dalam bentuk SKL, yang kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum, kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI dan KD), yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk rancangan pembelajaran, yang menjadi acuan dalam pembelajaran di sekolah.

SMK dan dunia industri idealnya harus saling berkaitan erat, karena industri merupakan pemakai dari lulusan SMK. Sebagaimana dideskripsikan di



atas, bahwa rendahnya keterserapan lulusan SMK untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang sesuai, salah satunya diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipelajari di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri terkait. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah bahwa pihak SMK sebagai penyuplai lulusan harus meningkatkan keterkaitan (*link*) dan kesesuaian (*match*) dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI).

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menyesuaikan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pembaharuan terhadap kurikulum sekolah memang merupakan suatu keniscayaan, karena kurikulum secara periodik harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil belajar yang diharapkan, dan kebutuhan masyarakat (terutama kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja). Perbaikan kurikulum SMK dapat ditempuh dengan cara menyusun kurikulum secara bersama antara pihak SMK dengan DU/DI terkait, atau dengan meminta masukan dari DU/DI mengenai kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan penelitian evaluasi besar kebutuhan antara kompetensi yang dibekalkan oleh SMK Teknologi Konstruksi dan Properti (dulu SMK Teknik Bangunan) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Seberapakah besar secara keseluruhan kompetensi yang dibutuhkan dari lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti pada

bidang Jasa Pengawas Lapangan di Dunia Industri Jasa Kontruksi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Seberapakah besar kompetensi personal yang dibutuhkan dari lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti pada bidang Jasa Pengawas Lapangan di Dunia Industri Jasa Kontruksi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Seberapakah besar kompetensi pengetahuan dasar yang dibutuhkan dari lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti pada bidang Jasa Pengawas Lapangan di Dunia Industri Jasa Kontruksi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Seberapakah kompetensi keterampilan kerja yang dibutuhkan dari lulusan SMK Program Keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti pada bidang Jasa Pengawas Lapangan di Dunia Industri Jasa Kontruksi Daerah Istimewa Yogyakarta?